

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*,

Ar-ruz Media, Yogyakarta, 2016.

Arief Subyantoro dan FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Andi

Offset, Yogyakarta, 2006.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Buku Monografi Nagari Panampuang

Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*,

Calpulis, Yogyakarta, 2015.

Davis, B Gordon. *Sistem Informasi Manajemen*. PT. Pustaka Binaman Presindo,

Jakarta, 2005.

DR. H. Inu Kencana Syafie, M.Si, 2011 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT

Rineka Cipta.

Dun, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua.

Yogyakarta: Gadjah mada University Press

Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Edisi 2*. BPFE. Yogyakarta

Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi

Askara

Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Perbandingan Administrasi Publik*, Modul, Konsep,

dan Aplikasi. Yogyakarta: Gava Media.

Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*.

Yogyakarta: Gava Media

Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo

Prof. Dr. Afrizal, M.A. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Pt RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2015.

Ramlan Surbakti. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Raymond MEleod, Jr, *Sistem Informasi Management Jilid Dua*, Edisi Bahasa Indonesia, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2001

Sjaf S, Elson L, Hakim L, Godya IM. 2020. *Data Desa Presisi*. Bogor: IPB Press

Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA

Jurnal

Abdu Nugraha, I. (2018). Proses Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan: Studi kasus Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen. In *Politika: Jurnal Ilmu Politik* (Vol. 8, Issue 2, p. 19).

Andriyanto, F., & Purnaweni, H. (2017). Analisis Stakeholders Dalam Formulasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 6(2), 1–13.

Angkupi,Prima. (2015). Formulasi Perkawinan Adat Lampung Dalam Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia. *Jurnal Asy-Syirah Universitas Muhammadiyah Metro* V49(2) di akses dari <http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2015.%25x>.

Arham I, Sjaf S, Darusman D. 2019. *Strategi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Pedesaan Berbasis Citra Drone*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*. 17[2] : 245-255.

Aulia,A., Sjaf,S., Gandi,R., Maulana,R., Made,I., Rama,R., Ayu,T., Membangun Data Desa Presisi di Desa Semplak Barat, Kabupaten Bogor, 3(1), 109-117. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*. ISSN 2721-897X

Handaka,A., Rara,R. Analisis Pengaruh Faktor Kritis pada Keberhasilan Proyek Data Desa Presisi. *Jurnal of Management and Business Review*, 2(1), 1-19. doi: <https://doi.org/10.34149/jmbr.v19i1.310>

Kristofol, Ibrahim K. (2016). Policy Formulation: Studi Peraturan Daerah Khusus Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua. *Jurnal Ilmu Sosial*. V14(3)

Misna,Andi. (2015).Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Universitas Mulawarman. V3(2).

Natalia,R., Sjaf S. (2021). Kualitas Pembangunan Desa Berbasis Data Desa Presisi (Kasus: Desa Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Sains KomuniKasi dan Pengembangan Masyarakat*, 05(05), 742-756. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i6.890>

Sampean, Sjaaf S. 2020. *The Reconstuction of Ethnodevelopment in Indonesia: A New Paradigm of Village Development in the Ammatoa Kajang Indigeneous Community, Bulukumba Regency, South Sulawesi*. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi. 25(2):159-192.

Rohayatun,Ika (2018) Formulasi Kebijakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sebong Kabupaten Bintan. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Sjaf S, Kaswanto K, Hidayat NK, Barlan ZA, Elson L, Sampean S, Gunadi HFF.2021. *Measuring Achievement of Suitainable Development Goals in Rural Area: A Case Study of Sukamantri Village in Bogor District, West Java, Indonesia*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan. 9(2).

Skripsi

Apriza, Tiyas. 2018. Formulasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Lembah Pelangi Pekon Suka Maju Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Skripsi. Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Febryananda, N. (2021). Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal. Skripsi. Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas.

Pradika, Widya. (2015) Formulasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pacitan. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Administrasi Negara. Surakarta. Universitas Sebelas Maret.

Syeftiani, Try. (2017). Formulasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Skripsi. Padang: Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Dipublikasikan.

Internet

Sjaf S. 2017 Des 15. Merebut Masa Depan Pertanian. Kompas.

Sjaf S. 2019. Involusi Republik Merdesa. Bogor: IPB Press

Dokumen dan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Nagari Panampuang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Berbasis Data Presisi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Nagari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Nagari

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

